

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, AZ., 1985, *Asas-asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.

Alatas, Shed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.

Ali, Achmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Ali, Muhammad, 1989, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Echolas, John M dan Hassan Shadily, 1995, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Freidmen, Lawrence Meir, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta.

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan interpretasi teks*, UII Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Kartanegara, Satochid, 1997, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lawrence Meir Freidmen, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mochtar, M. Akil, 2006, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Korupsi dan UNCAC Serta Hukum Administrasi Negara*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung.
- Prakoso, Djoko, dkk, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjohamidjoyo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjohamidjoyo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim H.S., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana (Pranadamedia Group), Jakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta.

Suyatna, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209.

Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515.

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

### C. Jurnal

Baharuddin Lopa.” Korupsi, Sebab-sebabnya dan penanggulangannya”, dalam *Majalah Prisma 3, 1996*.

Ganindra, Dyah Devina Maya dan Faizal Kurniawan, “Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan”, *Jurnal, Yuridika*, Volume 32 No. 2, Mei-Agustus 2017.

Siahaan, Lintong O., 2006, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.252 Bulan November 2006. Ikahi, Jakarta.

### D. Tesis/Tugas Akhir

Arge Arrif Suprabowo, Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

Eti Kurniasih, Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perumahan BPT Di Kota Bogor), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Erni Herawati, 2010, Status Dan Kedudukan Hak Atas Tanah Beserta Rumah Negara Yang Berdiri Di Atasnya, Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 262 PK/Pdt/2002 Tentang Sengketa Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah Asal Hak Barat Beserta Bangunan Rumah Negara Yang Berdiri Di Atasnya di Bekas Komplek Siliwangi Jakarta Pusat, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

## E. Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57260/pp-no-40-tahun-1994>, diunduh  
16 September 2019.

“Peraturan Rumah Negara”, diunduh dari  
<https://rng3.pu.go.id/sirn/assets/peraturan/SIRN-PERATURAN.pdf>, 3 Mei  
2019.